



PENETAPAN
Nomor 0063/Pdt.P/2017/PA. Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. Adam Bauw bin Soleman Bauw**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ketua Baperkam (Badan Pertimbangan Kampung), bertempat tinggal di Kampung Baru, RT 002, RW 001, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai **Pemohon I**.
- 2. Abo Kambori binti Abdin Kambori**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT 002 RW 001, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonan tertanggal 8 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0063/Pdt.P/2017/PA.Mw., tanggal 14 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 1982 di Kampung Baru, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Abdin Kambori**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) yang menjadi *munakah* (yang menikahkan) adalah Ayatu Rumatan, dengan saksi nikah masing-masing bernama Dula Rumatan dan Benor Kambori.

Hal. 1 dari 11 Pen.No.0063/Pdt.P/2017/PA.Mw.



2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 6 (enam) orang yang bernama :
 - 1) Dahlan Bauw, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 1982.
 - 2) Siti Bauw, perempuan, lahir pada tanggal 20 Februari 1985.
 - 3) Hijrah Bauw, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 1988
 - 4) Asun Bauw, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Juni 1991.
 - 5) Ruslan Bauw, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Mei 1994.
 - 6) Nabawia Bauw, perempuan, lahir pada tanggal 23 November 1997.
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut selain untuk kepastian hukum juga untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon.
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari, cq. Hakim Tunggal berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Adam Bauw bin Soleman Bauw**) dan Pemohon II (**Abo Kambori binti Abdin Kambori**) yang

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2017/PA.Mw



dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1982 di Kampung Baru, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini di sidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dan tempat pelaksanaan Sidang Terpadu Pengadilan Agama Manokwari selama 14 hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar berusaha mendapatkan surat nikah dari Pejabat yang berwenang, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk keperluan tersebut, tetapi tidak berhasil, maka Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Dula Rumatan bin Yakop Nawarisa**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Aranday, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Agama Islam dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1982 di Kampung Baru, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2017/PA.Mw



- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdin Kambori;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama Ayatu Rumatan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah Dula Rumatan dan Benor Kambori;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bukan sesusuan, telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan tidak membantahnya;

2. **Benor Kambori bin Betere Kokop**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Aranday, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2017/PA.Mw



- Bahwa Pemohon II adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut Agama Islam dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1982 di Kampung Baru, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdin Kambori;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama Ayatu Rumatan;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah Saksi sendiri dan Dula Rumatan;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, bukan sesusuan, telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2017/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya dan menyatakan tidak akan memberikan keterangan maupun alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dengan tujuan agar bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ataupun sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada saat pelaksanaan persidangan, dan ternyata sampai dengan pengumuman tersebut berakhir, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan sanggahan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 1982, di Kampung Baru, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdin Kambori, dengan mahar berupa uang Rp 5.000,00 Tunai dan yang menjadi

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2017/PA.Mw



Munakah (yang menikahkan) adalah Ayatu Rumatan, dengan disaksikan oleh Dula Rumatan dan Benor Kambori, dan pernikahan Para Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat selain itu dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan akta nikah dan sangat membutuhkan surat nikah demi kepastian hukum pernikahannya. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan yang dapat menghalangi pernikahannya serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak-anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tahun 1999 di Kampung Baru, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdin Kambori dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menikahkan (*Munakah*) Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung yang bernama Ayatu Rumatan sedangkan yang menjadi saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Dula Rumatan dan Benor Kambori;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak:

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2017/PA.Mw



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, dan bukan sesusuan serta tidak ada larangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materiil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah secara Agama Islam dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) anak;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II secara Syariat Islam tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara hukum Islam dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan antara keduanya sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh sebab itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan yang dengan tegas membenarkan tentang adanya perkawinan tersebut, maka hakim berpendapat

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2017/PA.Mw



keterangan dan pernyataan tersebut dipertimbangkan dan dapat diterima dengan mendasarkan kepada hujah syara' yang terdapat dalam Kitab *l'anutut Tholibin* Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalil permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, hakim perlu juga mengetengahkan pendapat ulama/doktrin agama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab *l'anutut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu, dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

2. Kitab *Bugyatul Musytarsyidin* halaman 209:

فاذا شهدت لها بيته على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetap sah pernikahannya itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan bukti diri telah terjadinya perkawinan, sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2017/PA.Mw



ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 12 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Adam Bauw bin Soleman Bauw**) dengan Pemohon II (**Abo Kambori binti Abdin Kambori**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1982 di Kampung Baru, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 *Hijriyah* oleh Rohayatun, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu Agus Gumbira, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2017/PA.Mw



PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ttd

Agus Gumbira, S.H.

ttd

Rohayatun, S.HI.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 91.000,00

Terbilang : *"sembilan puluh satu ribu rupiah"*

Manokwari, 10 Oktober 2017
Untuk salinan
Panitera,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., MH.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 0063/Pdt.P/2017/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)